



The Effect of Government Expenditure on the Level of Poverty in the People's Republic of North Sumatra Province in 2010-2021

Akase Sitinjak

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Corresponding Author : Akase Sitinjak sitinjakakase@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Government Expenditures, Poverty

Received : 21 June

Revised : 30 July

Accepted: 21 August

©2022 Sitinjak: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Poverty has become a common problem to hear about, but it is also a problem point that has not been resolved until today's progress. The purpose of this study is to find out how the influence of government spending on poverty levels in the province of North Sumatra. The data used for this research is secondary data. The data collection technique is through observation from North Sumatra bps data <https://sumut.bps.go.id/>. The research technique used in this research is path analysis. The results of the research using SPSS 25 data show that North Sumatra provincial government spending from 2010-2021 has a significant but negative effect on the poverty level of the people of North Sumatra province.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Kemiskinan Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2021

Akase Sitinjak

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Corresponding Author : Akase Sitinjak sitinjakakase@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pengeluaran Pemerintah, Kemiskinan

Received : 21 June

Revised : 30 July

Accepted: 21 August

©2022 Sitinjak: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Kemiskinan sudah menjadi masalah yang lumrah untuk didengar, namun juga menjadi poin permasalahan yang belum tertuntaskan hingga di kemajuan zaman saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan datanya melalui observasi dari data bps Sumatera Utara <https://sumut.bps.go.id/>. Teknik penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah regresi sederhana. Hasil penelitian dengan olah data SPSS 25 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi Sumatera Utara dari tahun 2010-2021 berpengaruh signifikan namun bersifat negatif terhadap tingkat kemiskinan masyarakat provinsi Sumatera Utara.

PENDAHULUAN

Kemiskinan sudah menjadi masalah yang lumrah didengar oleh telinga, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Permasalahan kemiskinan ini menjadi salah satu target utama dari setiap kebijakan pembangunan pemerintah di setiap negaratak terkecuali negara Indonesia ini. Tidak dapat dipungkiri sebab ada pendapat ahli yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh sebuah negara termasuk Negara Indonesia dapat dilihat dari kondisi kesejahteraan masyarakatnya (Marhaeni dkk., 2014).

Untuk itu pengeluaran pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan ini sangatlah berperan besar. Sebab pengeluaran pemerintah adalah salah satu komponen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan laju kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jika kebijakan pemerintah terkait pengeluaran tidak semaksimal mungkin, maka masalah kemiskinan akan lebih membesar. Sebagai pembuktian bahwasanya pengeluaran pemerintah memang memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan masyarakat, penulis memilih provinsi Sumatera Utara dan mengambil data-data terkait pengeluaran dan kemiskinan masyarakat melalui website bps sumut <https://sumut.bps.go.id/>. Adapun setelah menelusuri web data bps tersebut, peneliti mendapatkan data-data yang dibutuhkan diawali dari tahun 2010 hingga tahun 2021 sebagai berikut :

Table 1. Data Pengeluaran Pemerintah dan Kemiskinan di Sumatera Utara Tahun 2010-2021

Tahun	Pengeluaran	kemiskinan
2010	3,666.70	1,490,000
2011	4,611.47	1,436,400
2012	7,633.63	1,400,400
2013	7,260.47	1,416,400
2014	7,808.56	1,360,600
2015	7,959.17	1,508,140
2016	9,476.42	1,452,600
2017	12,518.86	1,326,600
2018	12,563.39	1,291,900
2019	13,440.32	1,260,500
2020	12,653.60	1,356,700
2021	13,749.50	1,273,070

Berdasarkan tabel berisi data di atas, diketahui bahwa tingkat pengeluaran pemerintah setiap tahunnya selalu naik kecuali tahun 2020, dan tingkat kemiskinan masyarakat terburuk berada di tahun 2015 dan setiap tahunnya jumlahnya menurun kecuali pada tahun 2020, sebab pada tahun 2020 jumlah kemiskinan Kembali naik dari tahun sebelumnya tahun 2019 yakni jumlah kenaikannya sebanyak 96, 200 jiwa sedangkan pada tahun yang sama

tahun 2020 pengeluaran pemerintah provinsi Sumatera Utara justru menurun yaitu sekitar 786.72 jt.

Dari contoh khusus pada tahun 2020 tersebut menjadi contoh langsung pengaruh dari pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan masyarakat. Dimana Ketika pengeluaran pemerintah tahun itu menurun diikuti dengan tingkat kemiskinan yang meningkat. Untuk lebih jelasnya, dapat diamati dibagian pembahasan dibawah ini.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah bentuk nyata dari suatu kebijakan pemerintah. Pengeluaran pemerintah ini menjadi suatu instrument penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Menurut peraturan pemerintah RI 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, memberikan defenisi pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan atau pelayanan admistratif yang di sediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Memecahkan masalah kemiskinan secara tidak langsung sudah memecahkan banyak persoalan negara ini baik dari segi politik, social hingga yang utama yaitu perekonomian. Dalam peraturan pemerintah tersebut ada tiga jenis pelayanan publik kepada masyarakat yaitu pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik dan pelayanan administratif.

Selanjutnya Rostow dan Musgrave (dalam Guritno (2016:170), yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Dalam tahap menengah pembangunan ekonomi, menjelaskan bahwa investasi pemerintah diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. hal ini juga dikembangkan (Wagner) yang menyatakan dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relative pengeluaran pemerintah meningkat. Menganalisis dari beberapa jurnal, seperti jurnal karya dari Nengah Rai Narka Suda Pratama et al. (2019), menyatakan Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dalam penelitian yang sama Nengah Rai Narka menghubungkan teori dari (Purnama, 2016) yaitu berisi bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi karena untuk menanggulangi kemiskinan tersebut masalah yang dihadapi tidak terbatas pada hal-hal yang menyangkut hubungan sebab akibat timbulnya kemiskinan tetapi juga melibatkan preferensi, nilai dan politik.

B. Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan menjadi poin utama yang menjadi titik berat pusat perhatian pemerintah seluruh negara. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan masyarakat atau suatu penduduk untuk memenuhi standar hidup minimum. Permasalahan standar hidup yang rendah berkaitan pula dengan jumlah pendapatan yang sedikit, perumahan yang kurang layak, kesehatan dan pelayanan kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga berakibat pada rendahnya sumber daya manusia dan banyaknya pengangguran, (Kuncoro, 2000). Beberapa faktor yang menjadi penyebab turunnya tingkat kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengeluaran pemerintah yang memiliki hubungan yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sedangkan untuk pengeluaran, kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Dan menurut World Bank yang telah menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk miskin adalah penduduk dengan pendapatan per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut World Bank adalah USD \$2 per orang per hari. Ukuran kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan pada norma pilihan dimana norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran didasarkan konsumsi (consumption based poverty line). Oleh sebab itu, menurut Kuncoro (1997) garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi terdiri dari dua elemen, yaitu: (1) Pengeluaran yang diperlukan untuk memberi standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya. (2) Jumlah kebutuhan yang sangat bervariasi yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan sehari-hari

METODOLOGI

Penelitian ini mengacu pada format atau bentuk laporan keuangan Gereja HKBP Penyusunan hasil penelitian ini didukung dengan metode penelitian kuantitatif. Dan teknik analisis yang digunakan adalah dengan regresi sederhana melalui aplikasi SPSS 25. penelitian kuantitatif ini dilihat dari segi tujuan, dan penelitian ini di pakai suatu teori, menyajikan suatu fakta atau mendiskripsikan statistic, juga untuk menunjukkan hubungan antar variable dan ada pula yang sifatnya mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman atau mendiskripsikan banyak hal. Sejalan Menurut Sarmanu (2017) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bertujuan menguji teori yang selama ini berlaku benar atau salah.

HASIL PENELITIAN**Hasil**

Tabel 2. Model Summary

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.826 ^a	.683	.651	49087.68942
a. Predictors: (Constant), pengeluaran pemerintah				
b. Dependent Variable: tingkat kemiskinan				

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0.826 dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variable bebas terhadap variable terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil pengkuadratan R. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R Square sebesar 0.683 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas yakni pengeluaran pemerintah terhadap variable terikat yakni tingkat kemiskinan masyarakat adalah sebesar 68.3 % sedangkan sisanya yang 31.7% lagi dipengaruhi oleh factor-faktor lain diluar variable pengeluaran pemerintah (variable x).

Tabel 3. ANOVA

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	51848618967 .763	1	51848618967 .763	21.518	.001 ^b
	Residual	24096012523 .904	10	2409601252. 390		
	Total	75944631491 .667	11			
a. Dependent Variable: tingkat kemiskinan						
b. Predictors: (Constant), pengeluaran pemerintah						

Pada tabel diatas dapat dilihat pengaruh nyata atau tingkat signifikansi variable pengeluaran pemerintah (x) terhadap tingkat kemiskinan penduduk (y). dari output tersebut terlihat bahwa F hitung = 21.518 dengan tingkat signifikansi/ probabilitas $0.001 < 0.05$, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi pengaruh variable pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan.

Tabel 4. Coefficient

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1567143.227	42534.643		36.844	.000
	pengeluaran pemerintah	-19.696	4.246	-.826	-4.639	.001

a. Dependent Variable: tingkat kemiskinan

1. Persamaan Regresi

Pada kolom B diketahui constant sebesar 1567143.27 dan koefisien regresi pengeluaran pemerintah sebesar -19.696. Sehingga persamaan regresinya adalah

$$Y = a + bx \text{ atau } 1567143.27 + (-19.696) x.$$

Dari tabel di atas dapat kita lihat terdapat pengaruh yang signifikan namun negatif dari pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan. Dimana Ketika variable pengeluaran pemerintah menurun sebesar -19.696 maka tingkat kemiskinan akan naik sebesar 1567143.27 satuan. Sebaliknya jika pengeluaran pemerintah naik sebesar 19.696 persen maka kemiskinan penduduk akan menurun sebesar 1567143.27 satuan.

2. Uji Signifikansi

Pada tabel koefisien diketahui nilai t hitung sebesar -4.639 dengan perolehan t tabel pada $\alpha = 0.005$ dan db = 8 yakni sebesar 1.85955. Sehingga $t_{hitung} (-4.639) < 1.85955$, maka H1 diterima. Artinya terdapat pengaruh negatif namun signifikan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan penduduk Sumatera Utara.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas maka dapat dipahami bahwasanya pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan namun bersifat negatif dan berlawanan karena nilai signifikansi pengeluaran pemerintah sebesar 68.3% sedangkan 31.7% sisanya dipengaruhi oleh factor-faktor lain diluar variable pengeluaran pemerintah (variable x). kemudian dikatakan berlawanan karena ketika variable pengeluaran pemerintah menurun sebesar -19.696 maka tingkat kemiskinan akan naik sebesar 1567143.27 satuan. Sebaliknya jika pengeluaran pemerintah naik sebesar 19.696 persen maka kemiskinan penduduk akan menurun sebesar 1567143.27 satuan, sesuai dengan hasil pada tabel koefisien.

Dari analisis melalui olah data tersebut diketahui bahwa Berdasarkan diperoleh pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Artinya bahwa pengeluaran pemerintah menjadi factor yang cukup penting dalam mengurangi tingkatan penduduk miskin pada provinsi Sumatera Utara. Jika mengikuti teori dari Adolf Wagner hasil analisis ini cocok, yang mana dinyatakan bahwa dalam suatu perekonomian terdapat beberapa penyebab meningkatnya pengeluaran pemerintah, diantaranya untuk peningkatan fungsi kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ketertiban dan keamanan. Dengan hadirnya pengeluaran pemerintah secara langsung telah mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakatnya, sehingga masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati suatu fasilitas berupa barang maupun jasa sedangkan masyarakat yang tergolong mampu akan lebih terbantu.

Penelitian ini telah sesuai dengan beberapa penelitian terdahulu diantaranya penelitian yang dilaksanakan oleh Nengah Rai Narka Suda Pratama et al. (2019), menyatakan Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kemudian penelitian lain dari Jung et al. (2009) dan Anderson (2009) juga mendukung hasil penelitian ini yang mana Jung dan Anderson menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah memegang peranan penting dalam pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan diperlukan kebijakan yang tepat dan terarah terhadap daerah-daerah kantong kemiskinan. Selain ketiga peneliti di atas terdapat peneliti lain yang juga mendukung hasil penelitian saya diantaranya oleh Filmer & Pritchett (1997), Fan & Thorat (2000), Dollar & Kraay (2001), Bigsten & Levin (2001), Fan & Rao (2004), Laabas & Limam (2004) dan Klasen (2005). Menurut penelitian mereka, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Jenis pengeluaran pemerintah yang dapat diidentifikasi mempunyai pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan adalah pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, teknologi, perumahan, subsidi dan transfer. Pengaruh pengeluaran pemerintah provinsi terhadap kemiskinan secara tidak langsung adalah negatif dan signifikan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian tentang penyusunan laporan keuangan Gereja HKBP Sidikalang II maka bisa di ambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pencatatan keuangan yang ada pada Gereja HKBP Sidikalang II masih berupa pencatatan yang sangat sederhana yakni *cash basis* dimana hanya melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran.
- b. Hasil konstruksi terhadap laporan keuangan pada Gereja HKBP Sidikalang II yang masih di susun sederhana dengan mengacu pada pedoman ISAK 35 adalah laporan aktivitas, laporan perubahan aset neto laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. Sehingga tahapan yang perlu di lakukan dalam pencatatan laporan keuangan antara lain. Mengumpulkan bukti transaksi, membuat

kode akun, membuat transaksi, memposting jurnal ke dalam buku besar, mengumpulkan data yang perlu untuk membuat jurnal, dan membuat laporan keuangan. Pengeluaran pemerintah provinsi Sumatera Utara memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Semakin banyak atau tinggi pengeluaran pemerintah Sumatera Utara terhadap masyarakat maka tingkat kemiskinan masyarakat akan menurun, sebaliknya jika pengeluaran pemerintah Sumatera Utara terhadap masyarakat menurun maka tingkat kemiskinan masyarakat tersebut meningkat. Untuk itu demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di provinsi Sumatera Utara ini pengeluaran pemerintah seyogianya lebih diarahkan ketepatan penyaluran dan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga pengeluaran tersebut tepat sasaran dan nilai gunanya tampak lebih efektif.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini tidak luput dari kekurangan. Berdasarkan hasil penelitian peneliti dapat memberikan saran kepada peneliti selanjutnya agar menemukan alternatif lain dalam pembuatan pembukuan uang keluar dan uang masuk agar setiap dana yang masuk dapat terperinci dengan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, D. M. 2009. The Effects of Poverty on the Susceptibility to Crime in South Africa. *Internasional Journal of Economic*, 1(1), 1-12.
- Pratama, N. R. N. S., and Made Suyana Utama. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali." *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 8.0 (2019): 07.
- Amalia, Rahmah, A. Rahman Razak, and K. Kunci. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat." *Jurnal Analisis* 4.2 (2015): 183-189.
- Sunusi, Dewi. "Analisis pengaruh jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan, pengeluaran pemerintah pada pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara tahun 2001-2010." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 14.2 (2014).
- Tauri, Zakiya. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pendapatan Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Lumowa, Rollin Prassetyo, Amran T. Naukoko, and Wensy IF Rompas. "Pengaruh Pengganguran, Pengeluaran Pemerintah Dan Jumlah

Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2019." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 21.7 (2021).

Bps.go.id. (2019). *Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara*. [online]
Available at: <https://sumut.bps.go.id/indicator/23/72/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-000-.html> [Accessed 29 Nov. 2022].

<https://sumut.bps.go.id/indicator/23/72/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-000-.html>

<https://sumut.bps.go.id/indicator/26/78/1/pengeluaran-per-kapita-disesuaikan.html>